



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

PENETAPAN

**RENCANA
KERJA**



2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan”** Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2024, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



RUDIYANTO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740513 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	35
2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58
Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	60
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	60
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	64
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun Berikutnya	64
Bab 5 Penutup.....	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Satpol PP Kabupaten Bangkalan.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan	37
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	45
Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024	59
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran PD	63
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bangkalan	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis antara lain:

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan tahun 2024, dan memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2024.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Renja. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD, Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun ke depan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023. Dalam Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya Renja ini akan menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 Nomor 18/E);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27 / E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

a. Maksud

Untuk merumuskan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Perubahan Rancangan Renstra 2024-2026

b. Tujuan

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
- 2) Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan tahun 2024;
- 3) Sebagai panduan mengevaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- Bab 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Program dan Kegiatan
- Bab 5 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangkalan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Ranwal Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 s.d 2026 tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Satpol PP
Kabupaten Bangkalan**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode RPD) Tahun 2024		RealisasiTarget Kinerja Hasil Programdan KeluaranKegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)						Target Program, Kegiatan, danSub Kegiatan Renja PerangkatDaerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat DaerahTahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100	
RPD 2024 – 2026																	
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021																	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	Rp 12,672,433,167		Rp 12.283.832.072	100	%	Rp 12,780,742,502		Rp 12,673,399,868		100	%	Rp 12,312,193,167	
01.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Rp 31,657,800		Rp 39,051,450	100	%	Rp 30,807,100		Rp 30,686,000		100	%	Rp 29.957.800	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	Dokumen	Rp 6.164.500.	3	Dokumen	Rp 26.503.400	3	Dokumen	Rp 5.924.500	3	dokumen	Rp 5.903.000	100	%	3	dokumen	Rp 6,164,500				
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 8.868.150				1	Dokumen	Rp 14.748.100	1	Dokumen	Rp 14.660.000	100	%	1	dokumen	Rp 8.868.150				
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1.791.750	1	Dokumen	Rp. 4.754.950	1	dokumen	Rp 1,599,100	1	dokumen	Rp 1.593.000	100	%	1	dokumen	Rp 1.791.750				
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 850.000																		

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 850.000																		
5.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 7.012.650	1	laporan	Rp. 7.793.100	1	laporan	Rp 8.535.400	1	laporan	Rp 8.530.000	100	%	1	laporan	Rp 7.012.650				
5.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6	Laporan	Rp 6.120.750												6	Laporan	Rp. 6.120.750				
5.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100	%	Rp 6.612.752.667			Rp 5.735.279.193			Rp 6.372.122.984			Rp 6.308.337.571					Rp 6.392.882.667				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	Rp 6.599.776.167	12	bulan	Rp. 5.701.955.093	12	bulan	Rp 6.358.881.184	12	bulan	Rp 6.295.371.571	100	%	80	Orang/bulan	Rp 6.379.906.167				
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 7.141.850	1	Laporan	Rp. 3.264.200	1	laporan	Rp 6.492.000	1	laporan	Rp 6.472.150	100	%	1	Laporan	Rp 7.141.850				
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	Rp 5.834.650	4	Laporan	Rp. 30.059.900	4	laporan	Rp 6.749.800	4	laporan	Rp 6.493.850	100	%	18	Laporan	Rp 5.834.650				
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	%	Rp 3.222.700			Rp -			Rp 5.735.200			Rp 5.491.000				Rp 1.611.350					
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 1.611.350																		

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	Rp 1.611.350			1	Dokumen	Rp 5.735.200	1	Dokumen	Rp 5.491.000	100	%	7	Laporan	Rp 1.611.350					
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan Kepegawaian	100	%	Rp 25.000.000			Rp. 150.639.000		Rp -			Rp -					Rp 38.055.000					
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	Rp -	337	Stel	Rp. 150.639.000															
5.01.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	Orang	Rp 25.000.000											11	orang	Rp38.055.000					
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100	%	Rp 84.535.550			Rp 121.855.903		Rp 174.337.735			Rp 166.491.430					Rp 90.734.950					
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	paket	Rp 2.500.000	12	bulan	Rp. 8.250.000	12	bulan	Rp 2.769.650	12	bulan	Rp 2.705.500	100	%	4	paket	Rp 1.791.800				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	paket	Rp 18.240.650											12	Paket	Rp 18.240.650					
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	paket	Rp 1.586.500																		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	paket	Rp 11.750.400	12	bulan	Rp. 40.505.100	12	bulan	Rp 79.380.000	12	bulan	Rp 76.660.000	100	%	8	paket	Rp9.000.000				
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	paket	Rp 2,000,000	12	bulan	Rp. 4,653,700	12	bulan	Rp 15.158.439	12	bulan	Rp 14.851.800	100	%	12	paket	Rp. 1.586.500				
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	dokumen	Rp. 3.500.000	12	bulan	Rp. 3.840.000									4	dokumen	Rp. 1.620.000				
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	Rp. 4.958.000												12	laporan	Rp. 4.958.000				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40	laporan	Rp 40.000.000	16	kali	Rp. 64.607.103	192	kali	Rp 77.029.646	150	kali	Rp 72.274.130	78	%	10	laporan	Rp 53.538.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

		SKPD																				
5.01.01. 2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD																				
5.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100	%	Rp -			Rp -			Rp 136.464.950			Rp 136.464.950					Rp 16.999.000			
1.05.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	unit	Rp -																	
1.05.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	unit	Rp -				2	jenis	Rp. 26.550.000	2	jenis	Rp. 26.550.000	100	%						

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	unit	Rp -			7	jenis	Rp. 109.914.950	7	Jenis	Rp. 109.914.950	100	%	1	unit	Rp16.999.000					
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan																					
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100	%	Rp 5.650.681.850			Rp. 5.989.263.528		Rp 5.611.762.400			Rp 5.591.825.125					Rp 5.495.609.800					
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	Rp 3.000.000	4	Jenis	Rp 4.906.000								4	Laporan	Rp 1.462.950					
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	Rp 201.281.850	11	bulan	Rp 46.101.128	12	bulan	Rp 54.695.400	12	bulan	Rp 51.027.195	100	%	12	Laporan	Rp201.281.850				
5.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan																					

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	Rp 5.446.400.000	12	bulan	Rp 5.938.256.400	12	bulan	Rp 5.557.067.000	12	bulan	Rp 5.540.797.930	100	%	12	laporan	Rp 5.292.865.000				
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	Rp 264.582.600			Rp 247.742.998			Rp 449.512.133			Rp 434.103.792					Rp 246.342.600				
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara, Dan dibayarkan pajaknya	1	unit	Rp 30.240.000	3	jenis	Rp 247.742.998	12	bulan	Rp 402.542.133	12	bulan	Rp 391.878.792	100	%							
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	19	unit	Rp 222.542.600												19	unit	Rp 234.542.600				
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	15	unit	Rp 4.470.000				12	bulan	Rp 46.970.000	12	bulan	Rp 42.225.000	100	%	15	unit	Rp 4.470.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara																					
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6	unit	Rp 1.450.000										6	unit	Rp 1.450.000						
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	Rp 5.880.000										1	unit	Rp 5.880.000						
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																					
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penindakan dalam pelanggaran Trantibum	100	%	Rp 1.979.060.250			Rp. 314.686.800			Rp 978.207.779			Rp 922.341.829			Rp .2.401.150.850						
5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman,dan keindahan)	100	%	Rp 98.270.000			Rp 241.257.900			Rp 370.854.500			Rp 351.075.300			Rp 83.870.000						
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pelaksanaan Patroli.	Jumlah Kasus gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli.	48	kasus	Rp 7.250.000	71	kali	Rp 107.737.600	72	kali	Rp 245.524.750	70	kali	Rp 235.610.800	97	%	48	kasus	Rp 7.250.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pengamanan, dan pengawasan																				
1.05.02.2.0 1.02	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	3	kasus	Rp 2.500.000	2	kali	Rp 6.577.600	6	kali	Rp 5.400.000	6	kali	Rp 5.220.000	100	%	5	Kasus	Rp 2.500.000			
1.05.02.2.0 1.03	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	3	dokumen	Rp 60.000.000	14	kali	Rp 20.429.500	17	kali	Rp 3.732.000	6	kali	Rp 3.732.000	50	%	1	dokumen	Rp 30.000.000			
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jml Dok yang Memuat Hasil Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dlm rangka Trantibum	1	dokumen	Rp 4.000.000	1	kali	Rp. 10.337.900	3	kali	Rp 86.420.250	3	kali	Rp 84.175.000	100	%	1	dokumen	Rp 8.020.000			

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02.2.0 1.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	orang	Rp 4.000.000	2	kali	Rp 16.009.800	26	orang	Rp 4.212.500	20	orang	Rp 4.181.500	80	%	1	dokumen	Rp 2.500.000				
1.05.02.2.0 1.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	1	dokumen	Rp 8.020.000	19	kali	Rp 44.735.500	38		Rp 25.565.000		29	Rp 18.156.000		%	1	laporan	Rp 4.600.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02. 2.01.08	Pengadaa n dan Pemeliha ran Sarana dan Prasarana Ketentram an dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentram an dan Ketertiban Umum yang Tersedia				3	Jenis	Rp 35.430.000												
1.05.02. 2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhir kan	1	dokum en	Rp 2.500.000											1	dokum en	Rp 25.000.000		

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02. 2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan n Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	laporan	Rp 10.000.000											20	orang	Rp 4.000.000				
1.05.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan perbup	100	%	Rp 1.876.790.250		Rp 57.865.400		Rp 607.353.279		Rp 571.266.529							Rp 2.313.280.850				
1.05.02. 2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	30	laporan	Rp 1.621.985.400			28 kali	Rp 556.623.779	27 kali	Rp. 538.803.179	98	%	30	laporan	Rp 1.813.987.200						

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02. 2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Pengawasa n yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaa n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal i Kota	6	lapor an	Rp 4.804.850	31	kali	Rp 27.496.000	12	kali	Rp 11.899.250	19	kali	Rp 11.667.100	100	%	6	lapora n	Rp 4.804.850				
---------------------	---	--	---	-------------	-----------------	----	------	------------------	----	------	---------------	----	------	---------------	-----	---	---	-------------	--------------	--	--	--	--

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02. 2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	59	laporan	Rp 250.000. 000	29 kali	Rp 30.369.400	94 kali	Rp 38.830.25 0	55 kali	Rp 20.796.250	70	%	59	lapo rani	Rp 494.488.800				
1.05.02. 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/K ota	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100	%	Rp 4.000.000		Rp 15.563.500		Rp -		Rp -					Rp 4.000.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02. 2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	laporan	Rp 4.000.000	26	orang	Rp 15.563.500							1	Laporan	Rp 4.000.000				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100	%	Rp 30.000.000			Rp 9.367.700			Rp 13.649.000			Rp 13.649.000			Rp 5.000.000				
1.05.03. 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	Rp 20.000.000			Rp 9.367.700			Rp 5.710.500			Rp 5.710.500			Rp 5.000.000				
1.05.03. 2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan																			

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

		dan Mitigasi Bencana																					
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas																					
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	orang	Rp 20.000.000	1	kali	Rp 9.367.700	30	peserta	Rp 5.710.500	30	peserta	Rp 5.710.500	100	%	30	Orang	Rp 5.000.000				
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	Rp 10.000.000			Rp -			Rp 7.938.500			Rp 7.938.500				Rp -					
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas							54	kali	Rp 7.938.500	55	kali	Rp 7.938.500	100	%							

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10	orang	Rp 10.000.000																
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100	%	Rp 175.000.000			Rp 2.081.784.300			Rp 100.000.000			Rp 92.729.000			Rp 96.970.000				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	86,67	%	Rp 104.835.200			Rp 2.081.784.300			Rp 93.100.000			Rp 88.129.000			Rp 81.497.400				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	dokumen	Rp 24.435.000	3	kegiatan	Rp 10.590.000	10	kali	Rp 24.660.000	11	kali	Rp 23.875.000	100	%	3	dokumen	Rp 24.435.000				
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	laporan	Rp 25.200.000	7	kegiatan	Rp 13.800.000	20	kali	Rp 21.000.000	32	kali	Rp 20.055.000	100	%	20	laporan	Rp 25.200.000				
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	dokumen	Rp 46.000.000	6	kali	Rp 5.460.000	20	kali	Rp 21.000.000	39	kali	Rp 18.795.000	100	%	20	dokumen	Rp 21.000.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.04. 2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah sarana dan prasarana utk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	8	unit	Rp 5.820.200	1	unit	Rp 2.040.674.000	5	jenis	Rp 19.190.000	2	jenis	Rp 18.974.000	80	%	8	unit	Rp 7.482.400				
1.05.04. 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18	orang	Rp 3.380.000	27	orang	Rp 11.260.300	27	orang	Rp 7.250.000	8	orang	Rp 6.430.000	80	%	28	orang	Rp 3.380.000				
1.05.04. 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	Rp 2.400.000			Rp –			Rp 6.900.000			Rp 4.600.000					Rp 2.400.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	2	Dokumen	Rp 1.200.000				1	dokumen	Rp 4.600.000	1	dokumen	Rp 4.600.000	100	%	2	dokumen	Rp 1.200.000				
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	2	Dokumen	Rp 1.200.000				1	dokumen	Rp 2.300.000	0	dokumen	-	0	%	2	dokumen	Rp 1.200.000				
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulang anKebakaran	100	%	Rp 5.220.000													Rp 2.190.000					
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatka n Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran	15	orang	Rp 5.220.000												18	oran g	Rp 2.190.000				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

		Setiap Tahunnya																				
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	Rp 62.544.800													Rp 10.882.600				
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15	unit	Rp 62.544.800											9	unit	Rp 10.882.600				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

TOTAL			Rp 14.856.493.417			Rp 14.689.670.872														

Evaluasi Renja tahun 2023 Satpol PP melaksanakan 4 Program, 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
 - Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran.
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan sub kegiatan :
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan sub kegiatan :
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat.
 - d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Fasilitasi Kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangannya
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan perlu menentukan sasaran yang ingin dicapai. Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan periode 2024-2026 dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Satpol PP tentunya menghadapi kompleksitas permasalahan, terutama di bidang penegakannya. Beberapa hal yang menjadi kendala antara lain sosialisasi Perda kepada masyarakat belum dapat optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap Perda masih sangat kurang sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan cukup tinggi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketentramanan dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Bangkalan nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka Satpol PP Kabupaten Bangkalan menyesuaikan beberapa kebijakan pada Program kegiatan diselaraskan dengan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indikator Tujuan : Indeks Kesalehan Sosial					2,22%	2,27%			2,22%	2,27%	
1	Indikator Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat					100%	100%			100%	100%	
			1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			176 Pelanggara n dan Pengaduan	172 Pelanggar an dan Pengadua n			176 pelang garan dan pengad uan	172 pelangg aran dan pengad uan	
			2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			60 Satlinmas	60 Satlinmas			60 Satlin mas	60 Satlinm as	
			3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			7 Perda	7 Perda			7 perda	7 perda	
			4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			1 Polisi Pamong praja	1 Polisi pamong praja			1 polisi pamon g praja	1 polisi pamong praja	
			5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan perkada serta penanganan gangguan Trantibum			27 Dokumen	27 Dokumen			27 dokum en	27 dokumen	

	Indikator Kinerja Kunci : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					71%	71%			71%	71%	
2.	Indikator Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat					75%	80%					
	Indikator Kinerja Kunci : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					100%	100%			100%	100%	
			1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			40 Layanan penyelamatan dan evakuasi	43 Layanan penyelamatan dan evakuasi			40 layanan penyelamatan dan evakuasi	43 layanan penyelamatan dan evakuasi	
			2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			0	0			0	0	
			3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			0	0			0	0	
			4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana			0	0			0	0	

			damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa									
			5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			235 Sarana prasarana	240 Sarana prasarana			235 sarana prasarana	240 sarana prasarana	
			6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			2 Aparatur	2 Aparatur			2 aparatur	2 aparatur	
			7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			20 relawan	25 relawan			20 relawan	25 relawan	

			8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran			2 kegiatan	2 kegiatan			2 kegiatan	2 kegiatan	
	Indikator Kinerja Kunci : Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran					90%	88,3%			90%	88,3%	
3.	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP PD					60,85	61,25					
4.	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat					85.25	85.30					
	Indikator Tujuan :											
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah			100%	100%			100%	100%			
	Indikator Sasaran :											
	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat			100%	100%			100%	100%			
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat			100%	100%			100%	100%			
	persentase penyelenggaraan kebencanaan			100%	100%			100%	100%			
	cakupan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			100%	100%			100%	100%			
	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan			100%	100%			100%	100%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang–undang no. 23 tahun 2013 pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakkan PerDa dan PerBup serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik. Oleh sebab itu ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan terciptanya kondisi Tentram, Aman, Tertib serta Perlindungan Masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja
2. Keterbatasan/ belum adanya Anggaran yang khusus diperuntukkan Standart Penilaian Minimal (SPM)

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan memantapkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan peningkatan keamanan dan ketertiban umum
2. Meningkatkan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui : Kerjasama dengan lembaga lainnya (Pihak ketiga/swasta) dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan

serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.

4. Optimalisasi sinergi dengan Satlinmas Desa agar saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renstra 2024-2026

Berdasarkan Rancangan Awal Renstra yang memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPd Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Indeks	13.266.252.033	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Indeks	13.266.252.033
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	%	31.657.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	%	31.657.800
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	6.164.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Rp 6.164.500
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.868.150	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 8.868.150
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.791.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1.791.750

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1	Dokumen	850.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 850.000
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	1	Dokumen	850.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 850.000
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.012.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 7.012.650
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6.120.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Rp 6.120.750
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100	%	7.254.671.533	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100	%	6.577.752.667
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	80	Orang/bulan	7.241.695.033	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/bulan	6.564.776.167

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.141.850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.141.850
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	5.834.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	5.834.650
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	%	3.222.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	%	3.222.700
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.611.350	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1.611.350
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	1.611.350	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	1,611,350
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang terfasilitasi Layanan kepegawaian	100	%	20.000.000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	322	paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	322	paket	20.000.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	0	Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	-
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100	%	105.462.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100	%	105.462.600
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	5.000.000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	18.240.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	18.240.650
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	1.586.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	1.586.500
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	10.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	2.177.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	2.177.450
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	3.500.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.958.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.958.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59	Laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	60.000.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100	%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100	%	-
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	unit	-
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	unit	-	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	-
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100	%	5.580.734.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100	%	5.642.834.800
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.462.950	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.462.950

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	201.281.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	201.281.850
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	5.377.990.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5.440.090.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	270.502.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	270.502.600
5.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	30.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	30.240.000
5.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit	228.462.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	228.462.600
5.01.01.2.09.00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	unit	4.470.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	4.470.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	5.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	5.880.000
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Satpol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	Unit	1.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Satpol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	unit	1.450.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penindakan dalam pelanggaran Trantibum	100	%	2.525.060.250	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penindakan dalam pelanggaran Trantibum	100	%	2.525.060.250
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Pengaduan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100	%	894.270.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Pengaduan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100	%	894.270.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	48	Kasus	7.250.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	48	Kasus	7.250.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02.2.01.00 16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Kasus	2.500.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Kasus	2.500.000
1.05.02.2.01.00 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen	60.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen	60.000.000
1.05.02.2.01.000 6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Dokumen	258.020.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Dokumen	258.020.000
1.05.02.2.01.00 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	2.500.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	2.500.000
1.05.02.2.01.00 17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan	10.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan	10.000.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	550.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	550.000.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Orang	4.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Orang	4.000.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	100	%	1.626.790.250	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	100	%	1.626.790.250
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah	Satpol PP	jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	30	laporan	1.621.985.400	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satpol PP	jumlah peserta yangmendapatkan sosialisasi	30	Laporan	1.621.985.400
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	jumlah penyelenggaraan pengawasan	6	Laporan	4.804.850	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	jumlah penyelenggaraan pengawasan	3	Laporan	4.804.850
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	jumlah penanganan pelanggaran Perda	0	laporan	-	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	jumlah penangananpelanggaran Perda	0	Laporan	-

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Aparatur yang ikut Pelatihan	100	%	4.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Aparatur yang ikut Pelatihan	100	%	4.000.000
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan PenegakanPerda dan Perkada	1	laporan	4.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta PenegakanPerda dan Perkada	1	Laporan	4.000.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100	%	30.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase pelayananpenanggulangan bencana	100	%	30.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	20.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	20.000.000
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Personil TRC Yang Dikembangkan KapasitasTeknis dan Manajerialnya	30	Orang	20.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	20.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100	%	10.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100	100%	10.000.000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong,dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10	Orangi	38,610,000.00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10	Orang	10.000.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani	100	%	175.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani	100	%	175.000.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase waku tanggap (response time) penanganan kebakaran	90	%	104.835.200	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase waku tanggap (response time) penanganan kebakaran	90	%	104.835.200
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/PenangulanganKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	Dokumen	24.435.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SatpolPP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	Dokumen	24.435.000
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piketdan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Laporan	25.200.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Laporan	25.200.000
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Dokumen	46.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Dokumen	46.000.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.04.2.01.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8	unit	5.820.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8	Unit	5.820.200
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18	Orang	3.380.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18	Orang	3.380.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	2.400.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	2.400.000
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	1.200.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	1.200.000
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	1.200.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	1.200.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	100	%	5.220.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	100	%	5.220.000	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan SosialisasiEdukasi Pencegahan dan Penanggulangan KebakaranSetiap Tahunnya	15	Orang	5.220.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	SatpolPP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan SosialisasiEdukasi Pencegahan dan Penanggulangan KebakaranSetiap Tahunnya	15	Orang	5.220.000	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	62.544.800	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	62.544.800	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15	unit	62.544.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15	Unit	62.544.800	
TOTAL						15.996.312.283	TOTAL						15.996.312.283

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan dalam hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Dari uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
			Nilai		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
2. Membentuk Satlinmas tingkat Desa dan Kecamatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas
3. Meningkatkan Standar Mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan Trantibum Linmas
4. Meningkatkan standar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Membentuk Pasukan Tanggap Darurat Bencana (Trenggana) atau Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
6. Meningkatkan pelayanan kebencanaan berupa pemenuhan informasi rawan bencana dan optimalisasi evakuasi bencana kepada masyarakat
7. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak
8. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan
9. Meningkatkan sarpras dan kualitas pelayanan SDM

Arah kebijakan ini harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rancangan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah *“Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”*.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menentukan sasaran utama pelaksanaan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Sebagai Berikut:

- a) Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat
- b) Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time
- c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Gambaran tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat pada tabel Tugas dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

3.3. Program dan Kegiatan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana tertuang berikut ini :

- a. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- b. Sasaran : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat
 - Tujuan : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Sasaran : Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat
 - Strategi :
 1. 1.1. optimalisasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - 1.2. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan Strategi
 - 1.3. optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM)
 2. 2.1 optimalissi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
 3. 3.1 optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat

- Kebijakan
 1. 1.1. Meningkatkan Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
 - 1.2. membentuk satlinmas tingkat desa dan kecamatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas
 - 1.3. meningkatkan standar mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan trantibum linmas
 - 1.4. meningkatkan standar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar pelayanan minimal
 - 1.5. membentuk Pasukan Tanggap Darurat Bencana (Trenggana) atau Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
 - 1.6. meningkatkan pelayanan kebencanaan berupa pemenuhan informasi rawan bencana dan optimalisasi evakuasi bencana kepada masyarakat.
 2. 2.1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak
 - 2.2 Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan
 3. 3.1 Meningkatkan sarpras dan kualitas pelayanan SDM

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja
2. Keterbatasan/ belum adanya Anggaran yang khusus diperuntukkan Standart Penilaian Minimal (SPM)

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran Perangkat daerah			
		Target				Target	
Uraian	Indikator	2024	2025	Uraian	Indikator	2024	2025
Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat atau Perda yang terselesaikan	2,22%	2,27%	Penguatan Penegakan Perda Trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase Penindakan dalam Pelanggaran Trantibum	100%	100%
				Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara response time	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	75%	80%
				Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	61,25
					Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	85,25	85,30

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun Berikutnya

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Perubahan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100	indeks	Rp 13.266.252.033			100	indeks	Rp 12.616.433.167
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		100	%	Rp 31.657.800			100	%	Rp 31.657.800
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	3	Dokumen	Rp 6.164.500	APBD		3	Dokumen	Rp 6.164.500
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 8.868.150	APBD		1	Dokumen	Rp 8.868.150
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 1.791.750	APBD		1	Dokumen	Rp 1.791.750
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 850.000	APBD		1	Dokumen	Rp 850.000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 850.000	APBD		1	Dokumen	Rp 850.000
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	1	Laporan	Rp 7.012.650	APBD		1	Laporan	Rp 7.012.650
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Satpol PP	6	Laporan	Rp 6.120.750			6	Laporan	Rp 6.120.750
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu		100	%	Rp 7.254.671.533				100%	Rp 6.577.752.667
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	80	Orang/bulan	Rp 7.241.695.033	APBD		80	Orang/bulan	Rp 6.564.776.167
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	1	Laporan	Rp 7.141.850	APBD		1	Laporan	Rp 7.141.850
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	18	Laporan	Rp 5.834.650	APBD		18	Laporan	Rp 5.834.650
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir		100	%	Rp 3.222.700				100%	Rp 3.222.700

5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 1.611.350			1	Dokumen	Rp 1.611.350
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	7	Laporan	Rp 1,611,350	APBD		7	Laporan	Rp 1,611,350
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100	%	Rp 20.000.000			100	%	Rp -
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	322	Paket	Rp 20.000.000	APBD		0	Paket	Rp -
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	0	Orang	Rp -	APBD		0	Orang	Rp -
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi		100	%	Rp 105.462.600			100	%	Rp 88.535.550
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Satpol PP	4	Paket	Rp 5.000.000	APBD		4	Paket	Rp 2.500.000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Satpol PP	12	Paket	Rp 18,240,650	APBD		12	Paket	Rp 21,981,150
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satpol PP	4	Paket	Rp 1.586.500	APBD		4	Paket	Rp 1.586.500
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Satpol PP	8	Paket	Rp 10,000,000	APBD		8	Paket	Rp 12,000,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024

5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Satpol PP	12	Paket	Rp 2.177.450	APBD		12	Paket	Rp 2.009.900
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Satpol PP	4	Dokumen	Rp 3.500.000	APBD		4	Dokumen	Rp 3.500.000
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Satpol PP	12	Laporan	Rp 4,958,000	APBD		12	Laporan	Rp 4,958,000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	59	Laporan	Rp 60.000.000	APBD		40	Laporan	Rp 60.000.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD		100	%	Rp -				100%	Rp -
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Satpol PP	0	Unit	-	APBD		0	Unit	Rp -
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	0	Unit	Rp -	APBD		0	Unit	Rp -
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Satpol PP	0	Unit	Rp -	APBD		0	Unit	Rp -
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti		100	%	Rp. 5.580.734.800				100%	Rp. 5.650.681.850
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	4	Laporan	Rp 1,462,950	APBD		4	Laporan	Rp 3.000.000

5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Satpol PP	12	Laporan	Rp	201,281,850	APBD		12	Laporan	Rp	201,281,850
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Satpol PP	12	Laporan	Rp	5.377.990.000	APBD		12	Laporan	Rp	5.446.400.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100	%	Rp	270.502.600			100	%	Rp	264.582.600
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Satpol PP	1	Unit	Rp	30.240,000	APBD		1	Unit	Rp	30.240,000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Satpol PP	19	Unit	Rp	228.462.600	APBD		19	Unit	Rp	222.542.600
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Satpol PP	15	Unit	Rp	4.470.000	APBD		15	Unit	Rp	4.470.000
5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Satpol PP	6	Unit	Rp	1.450.000	APBD		6	Unit	Rp	1.450.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Satpol PP	1	Unit	Rp	5,880,000	APBD		1	Unit	Rp	5,880,000

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran Trantibum		100	%	Rp 2.525.060.250			100	%	Rp 2,025,060,250
5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)		100	%	Rp 894.270.000			100	%	Rp 144.270.000
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	48	Kasus	Rp 7,250,000	APBD		48	Kasus	Rp 7,250,000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	3	Kasus	Rp 2,500,000	APBD		3	Kasus	Rp 2,500,000

1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	3	Dokumen	Rp 60,000,000	APBD		3	Dokumen	Rp 60,000,000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	2	Dokumen	Rp 550,000,000	APBD		2	Dokumen	Rp 50,000,000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	20	Orang	Rp 4,000,000	APBD		20	Orang	Rp 4,000,000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 258,020,000	APBD		1	Dokumen	Rp 8,020,000

1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 2,500,000	APBD		1	Dokumen	Rp 2,500,000
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	1	Laporan	Rp 10,000,000	APBD		1	Laporan	Rp 10,000,000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup		100	%	Rp 1.626.790.250			100	%	Rp 1,876,790,250
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Satpol PP	30	Laporan	Rp 1,621,985,400	APBD		30	Laporan	Rp 1,621,985,400
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	6	Laporan	Rp 4,804,850	APBD		6	Laporan	Rp 4,804,850
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Satpol PP	59	Laporan	Rp -	APBD		59	Laporan	Rp 250.000.000

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase aparatur yang ikut pelatihan		100	%	Rp 4,000,000			100	%	Rp 4,000,000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta PenegakanPerda dan Perkada	Satpol PP	1	Laporan	Rp 4,000,000	APBD		1	Laporan	Rp 4,000,000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana		100	%	Rp 30,000,000			100	%	Rp 30,000,000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100	%	Rp 20,000,000			100	%	Rp 20,000,000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Satpol PP	30	Orang	Rp 20,000,000	APBD		30	Orang	Rp 20,000,000

1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	%	Rp 10.000.000			100	%	Rp 10.000.000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Satpol PP	10	Orang	Rp 10.000.000	APBD		10	Orang	Rp 10.000.000
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani		100	%	Rp 175,000,000			100	%	Rp 175,000,000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100	%	Rp 104,835,200			100	%	Rp 104,835,200
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Satpol PP	10	Dokumen	Rp 24,435,000	APBD		10	Dokumen	Rp 24,435,000

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	20	Laporan	Rp	25,200,000	APBD		20	Laporan	Rp	25,200,000
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	20	Dokumen	Rp	46,000,000	APBD		20	Dokumen	Rp	46,000,000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satpol PP	8	Unit	Rp	5,820,200	APBD		8	Unit	Rp	5,820,200
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP	18	Orang	Rp	3,380,000	APBD		18	Orang	Rp	3,380,000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	%	Rp	2,400,000			100	%	Rp	2,400,000

1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2	Dokumen	Rp 1,200,000	APBD		2	Dokumen	Rp 1,200,000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2	Dokumen	Rp 1,200,000	APBD		2	Dokumen	Rp 1,200,000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100	%	Rp 5,220,000			100	%	Rp 5,220,000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Satpol PP	15	Orang	Rp 5,220,000	APBD		15	Orang	Rp 5,220,000
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		100	%	Rp 62,544,800			100	%	Rp 62,544,800

1.05.04.2. 05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Satpol PP	15	Unit	Rp	62,544,800	APBD		15	Unit	Rp	62,544,800
TOTAL						Rp	15,996,312,283					Rp	14,846,493,417

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan P-RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan dapat menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaan program kegiatan, efektivitas kerja sangat perlu dilakukan guna untuk memantau dan mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Penetapan Renja PD Tahun 2024 memiliki rentang waktu yang cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran R-APBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan meliputi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur; perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat; ketersediaan anggaran; dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran. Dengan adanya Penetapan Renja Tahun 2024, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bangkalan, 09 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



RUDIYANTO, S.SOS.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740513 199302 1 001